



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



## MEKANISME KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Jakarta, 20 November 2017

**3-6**

**CAPACITY BUILDING**

**OUTLINE**

**7-18**

**MEKANISME KERJA TPIN**

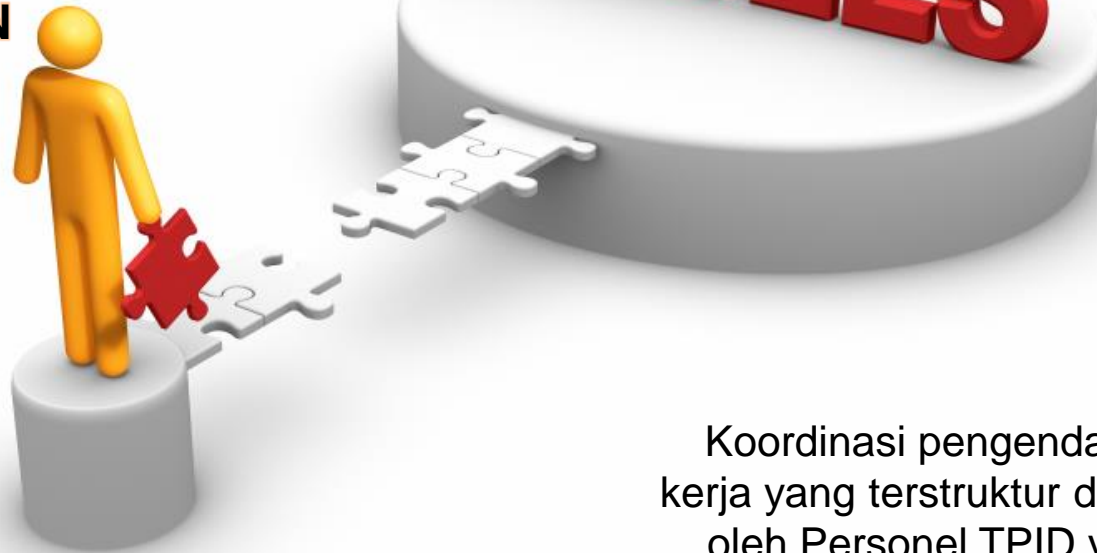
**19-22**

**KEPMENDAGRI PEMBENTUKAN TPID**

# CAPACITY BUILDING



**DIPERLUKAN BERBAGAI  
UPAYA DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN  
KUALITAS KINERJA TPID  
UNTUK BISA MENGISI 'GAP'  
MELALUI PENINGKATAN  
SKILL & KNOWLEDGE  
PERSONEL TPID SECARA  
BERKESINAMBUNGAN**



## **KONDISI SAAT INI**

- Tingkat Kepedulian Kepala Daerah bervariasi ·
- Dinamika seringnya mutasi pejabat masih terjadi ·
- Level Pemahaman Personel TPID yang berbeda-beda ·
  - Ketimpangan kompetensi TPID ·
- Capacity building oleh TPID belum mengacu pada standar tertentu ·
- Kesenambungan relatif belum menjadi isu penting ·

## **KONDISI IDEAL**

Koordinasi pengendalian inflasi di daerah dengan program kerja yang terstruktur dan berkesinambungan yang didukung oleh Personel TPID yang memiliki kapasitas memadai dan didukung sepenuhnya oleh Pimpinan Daerah



# TARGET CAPACITY BUILDING

## PIMPINAN DAERAH

Sebagai Ketua TPID, Pimpinan Daerah diharapkan memiliki pemahaman yang memadai akan arti pentingnya pengendalian inflasi



## PERSONEL (MID LEVEL) TPID

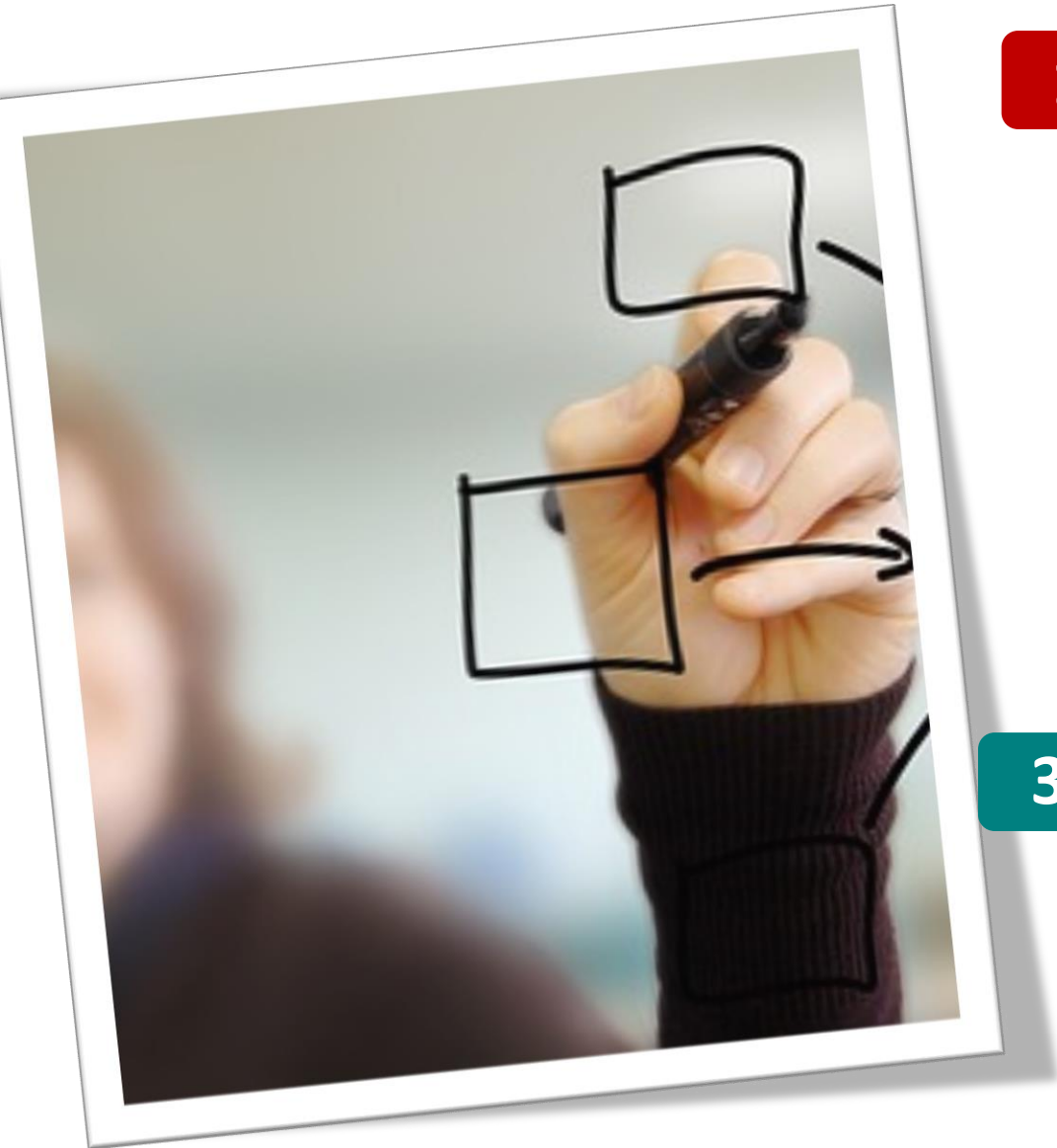
Pejabat Eselon III pada TPID harus dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan untuk mengawal pelaksanaan tugas dan kegiatan TPID

## PEJABAT BANK INDONESIA

Untuk mendukung kinerja TPID, Pejabat BI diharapkan dapat memahami juga *business process* dan birokrasi di Pemerintahan Pusat dan Daerah



## HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN:



1

**Tracking ownership** ke daerah untuk mendapatkan masukan terkait pengembangan sistem *capacity building*.

2

**Mengembangkan konsep pelaksanaan *capacity building*** dilakukan baik secara *offline* (pertemuan langsung) maupun *online* (*Moodle Cloud*)

3

**Penyusunan materi** yang akan disampaikan dalam *capacity building* dari beberapa Kementerian/Lembaga terkait misalnya metode perhitungan inflasi oleh BPS, Inflasi dan Pembangunan Daerah oleh BKF, dll

# MEKANISME KERJA TPIN



# MEKANISME KERJA TPIN

## Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka penetapan kebijakan pengendalian inflasi baik di tingkat pusat (TPIP), maupun tingkat daerah (TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota)

**MEKANISME KERJA KOORDINASI  
PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL**

Pasal 7 (1) Keppres 23/2017

**Penerapan sistem akuntabilitas kinerja; dan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi**

## Pemberian Penghargaan

Diberikan oleh presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya.

## Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja nantinya dijadikan dasar dalam penetapan penerima penghargaan TPID dan bersifat dinamis.

## Penyusunan SOP

Penyusunan beberapa SOP dilakukan oleh sekretariat TPIP antara lain mekanisme dan kriteria penilaian, mekanisme *capacity building*

## Penyusunan Laporan

Sesuai amanat dalam Keppres pasal 6, bahwa laporan disusun secara triwulanan.





# RAPAT KOORDINASI

## RAPAT KOORDINASI NASIONAL

- Dipimpin oleh Presiden RI
- dapat bersifat terbuka
- Hasil : arahan dan/atau rekomendasi
- Diselenggarakan Berkala, paling sedikit satu tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan

## RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH

- Dipimpin Ketua Pokja Daerah TPIP
- Hasil : kesepakatan tindak lanjut/implementasi hasil Rakornas di tingkat daerah.
- dihadiri oleh Sekda selaku Pelaksana Harian

## RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

- dipimpin oleh Ketua TPID Provinsi/ Kabupaten/Kota
- menghasilkan kesepakatan langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

## RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA

- Dipimpin oleh Ketua/Wakil ketua TPIP
- Tujuan : rekomendasi sasaran inflasi; rekomendasi atau langkah strategis kebijakan sektoral; rekomendasi atau langkah2 strategis Kebijakan tingkat pusat dan daerah

## RAPAT KOORDINASI SE-PROVINSI

- dipimpin oleh Ketua TPID Provinsi
- Hasil : kesepakatan langkah2 koordinatif pengendalian inflasi di tingkat Provinsi

## RAPAT KOORDINASI ANTAR TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- Diselenggarakan atas inisiasi satu/lebih TPID
- Substansi Pembahasan/hasil : kerjasama antar daerah; studi banding; peningkatan kapasitas; kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.



### Dalam waktu Dekat :

Penyelenggaraan call for meeting dalam bentuk HLM Statistik Inflasi (terkait penyelenggaraan SBH)





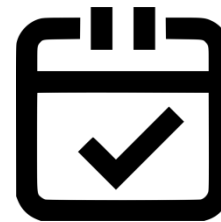
## Tugas Sekretariat TPIP

1. Menyelenggarakan forum koordinasi di tingkat pusat
2. Kompilasi laporan analisis inflasi nasional dan daerah
3. Penyelenggaraan kantor sekretariat
4. Penyelenggaraan Sistem pelaporan inflasi (nasional & daerah)
- 5. Panduan teknis penyelenggaraan tugas TPIP**
6. Menyelenggarakan pertemuan insidentil untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak atas usulan anggota TPIP (call for meeting)
7. Pemeliharaan laman situs TPIP
8. Kompilasi laporan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota
9. Meyusun laporan pelaksanaan tugas TPIP
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung TPIP



## Penyusunan SOP

Pasal 4 Kepmenko Perekonomian 148 tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat TPIP, maka dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat dapat menyusun SOP yang ditetapkan oleh Ketua Sekretariat TPIP



## Dalam waktu Dekat

### Dalam waktu Dekat :

1. Penetapan SOP Capacity Building
2. Penetapan SOP Kriteria Pelaksanaan Evaluasi Kinerja TPID



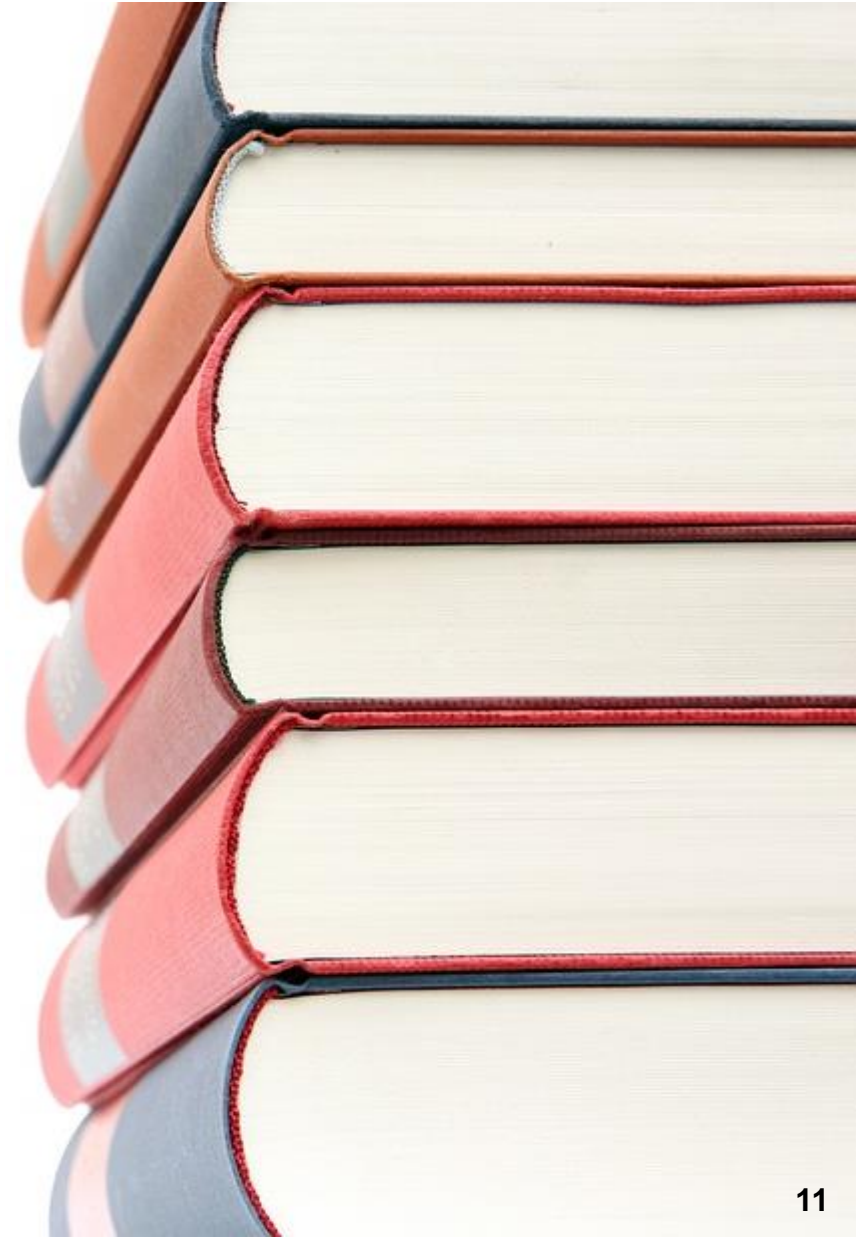
# PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN

Sejak diterbitkannya Keppres No 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka mekanisme laporan Semesteran yang sebelumnya ada dalam Inmendagri No:027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, digantikan menjadi laporan Triwulanan.

**Laporan Triwulanan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya meliputi:**

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**“Untuk TPID Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulanan kepada TPID Provinsi yang ditembuskan kepada Sekretariat TPIP (melalui website)”**





# PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN MELALUI WEBSITE

1 KLIK MENU **INTERNAL**

2 MASUKKAN **USERNAME** DAN **PASSWORD** MASIING-  
MASING DAERAH YANG TELAH DIBERIKAN OLEH  
POKJANAS TPID, KEMUDIAN KLIK **LOG IN**

(Jika ada yang merasa belum pernah mendapat atau hilang dapat meminta melalui email pokjanas.tpid@outlook.com)

3 KLIK **LAPORAN TRIWULAN** LALU PILIH  
TRIWULAN 1,2,3 ATAU 4. KLIK **TAHUN**  
KEMUDIAN KLIK **WILAYAH SUMATERA, JAWA**  
ATAU **KTI**

4 ISI **POINT 1** TENTANG PERKEMBANGAN INFLASI  
DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA  
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING,  
BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE  
DEPAN

BERANDA TENTANG PEMANTAUAN INFLASI KEGIATAN PEDOMAN INFORMASI KEBUJAKAN INTERNAL

POKJANAS TPID BERANDA TENTANG PEMANTAUAN INFLASI KEGIATAN PEDOMAN INFORMASI KEBUJAKAN INTERNAL

This content is for members only. You must log in to view this content.

**Login**

1 Username or Email prov.bali@outlook.com

2 Password .....

Remember me

Forget?

Log In

POKJANAS TPID BERANDA TENTANG PEMANTAUAN INFLASI KEGIATAN PEDOMAN INFORMASI KEBUJAKAN INTERNAL

Prov. Bengkulu View Profile Log Out

FORMULIR LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS TPID TRIWULANAN (KEPPRES NO.23 TAHUN 2017 PASAL 6)

LAPORAN TRIWULAN: 1 TAHUN: 2017 WILAYAH TPID: Sumatera

1. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE DEPAN.

Karakter tersisa: 3000



# PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI WEBSITE

5 ISI POINT 2 S.D 5

6 UNGGAH FILE (JIKA PERLU ATAU ADA)

7 KLIK TOMBOL **KIRIM**

❖ LAPORAN TRIWULAN TPID OTOMATIS AKAN TERSIMPAN DALAM DATABASE SEKRETARIAT TPIP

BERANDA    TENTANG    PEMANTAUAN INFLASI    KEGIATAN    PEDOMAN    INFORMASI KEBLIKAKAN    INTERNAL

2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Karakter tersisa: 3000

3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Karakter tersisa: 3000

4. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Karakter tersisa: 3000

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

Karakter tersisa: 3000

6. UPLOAD FILE LAPORAN (JIKA ADA)  No file chosen  
(Max: 2MB, pdf/doc/docx)



# Evaluasi Kinerja TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota

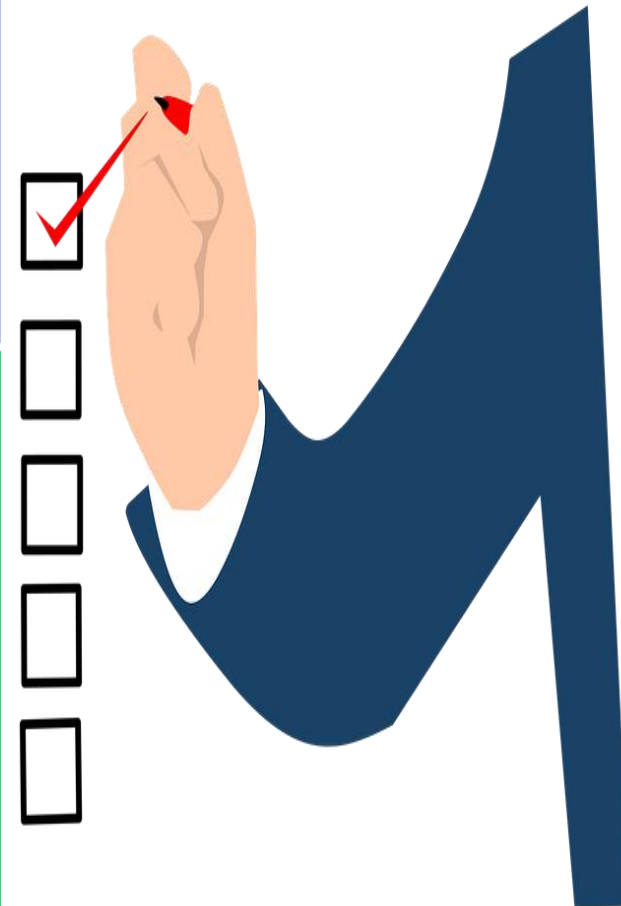
Salah satu tugas Kelompok Kerja (Pokja) Daerah sesuai Kepmenko 148/2017 pasal 3 ayat (1) huruf f bahwa **Pokja Daerah merumuskan kriteria pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota** serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah.

**Hasil evaluasi kinerja tersebut dijadikan dasar TPID untuk menentukan penerima penghargaan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota** yang akan diumumkan pada saat pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk **mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah** dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.

**Kriteria evaluasi kinerja disusun berdasarkan :**



1. realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
2. panduan-panduan yang terkait pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota;
3. arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
4. hasil Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah;
5. kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
6. pertimbangan kesinambungan program kerja TPID Provinsi dan/atau TPID Kabupaten/Kota.





# TRANSISI PENILAIAN EVALUASI KINERJA TPID

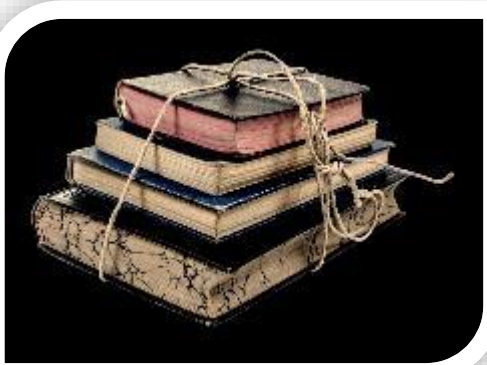
Konsep penilaian evaluasi kinerja TPID untuk tahun berikutnya secara umum tidak akan terjadi perubahan kriteria secara dratis. Perubahan penilaian evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengakomodasi atas beberapa arahan presiden

Aspek Pengukuran	Penilaian Evaluasi Kinerja TPID 2015	Penilaian Evaluasi Kinerja TPID 2016	Konsep Penilaian Evaluasi Kinerja TPID 2017 (tahap pembahasan)
<p><b>OUTCOME</b></p>  <p><b>40%</b> bobot</p> <p>Mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi</p>	<p>a. Realisasi inflasi (Bobot 20%)</p> <p>b. Volatilitas inflasi (Bobot 20%)</p>	<p>a. Realisasi inflasi (Bobot 20%)</p> <p>b. Volatilitas inflasi (Bobot 20%)</p>	<p>a. Realisasi inflasi (Bobot 15%)</p> <p>b. Volatilitas inflasi (Bobot 15%)</p> <p>c. Realisasi belanja total APBD (Bobot 5%)</p> <p>d. Rasio belanja modal APBD (Bobot 5%)</p>
<p><b>PROCESS</b></p>  <p><b>60%</b> bobot</p> <p>Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah</p>	<p>c. Intensitas kegiatan (Bobot 20%)</p> <p>d. Kualitas program kerja (Bobot 40%)</p>	<p>c. Koordinasi (Bobot 10%)</p> <p>d. Rekomendasi kebijakan (Bobot 10%)</p> <p>e. Inovasi program (Bobot 30%)</p> <p>f. Akuntabilitas (Bobot 10%)</p>	<p>e. Koordinasi (Bobot 10%)</p> <p>f. Rekomendasi kebijakan (Bobot 10%)</p> <p>g. Akuntabilitas (Bobot 10%)</p> <p>h. Inovasi program (Bobot 30%)</p>



# ALUR PENILAIAN KINERJA TPID 2017: **TRANSISI**

## Pengiriman dan Penyampaian Dokumen



- 1 Pengiriman Surat Permintaan Dokumen Penilaian
- 2 Penyampaian Dokumen oleh TPID

## Verifikasi



- 3 Perhitungan Aspek Proses
- 4 Perhitungan Aspek Outcome
- 5 One Page Summary Program Kerja Unggulan
- 6 Review kegiatan koordinasi, perumusan rekomendasi dan dokumen laporan TPID

## Penilaian



- 7 Perhitungan percentile/komponen
- 8 Perhitungan agregat nilai

## Penentuan Akhir



- 9 Wawancara/verifikasi
- 10 Adjustment nilai agregat (bila ada)
- 11 Penentuan rating\*
- 12 Pleno Penentuan Pemenang
- 13 Pengumuman Pemenang saat Rakornas TPID

\*) Usulan penentuan rating menggunakan metode S&P





# PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN MELALUI WEBSITE

1 KLIK MENU **INTERNAL**

2 MASUKKAN **USERNAME** DAN **PASSWORD** Masing-masing daerah yang telah diberikan oleh POKJANAS TPID, kemudian KLIK **LOG IN**

(USERNAME DAN PASSWORD SAMA SEPERTI YANG DIGUNAKAN KETIKA MENGISI LAPORAN TRIWULANAN)

3 KLIK **WILAYAH TPID** SUMATERA, JAWA ATAU KTI ISI **SUBJEK** (MISAL, RAPAT HLM, NOTA DINAS, DLL)

4 UNGGAH **FILE LAPORAN KEGIATAN** (NOTULENSI RAPAT, NOTA DINAS, DLL)

5 KEMUDIAN KLIK TOMBOK **KIRIM**

BERANDA TENTANG PEMANTAUAN INFLASI KEGIATAN PEDOMAN INFORMASI KEBUJAKAN INTERNAL

POKJANAS TPID BERANDA TENTANG PEMANTAUAN INFLASI KEGIATAN PEDOMAN INFORMASI KEBUJAKAN INTERNAL

This content is for members only. You must log in to view this content.

**Login**

1 Username or Email

2 Password

Remember me

[Forget?](#)

POKJANAS TPID BERANDA TENTANG PEMANTAUAN INFLASI KEGIATAN PEDOMAN INFORMASI KEBUJAKAN INTERNAL

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN TPID

WILAYAH TPID:

SUBJEK:

CATATAN:

Kapasitas: 3000

UPLOAD FILE LAPORAN  No file chosen

(Max 2MB, pdf/doc/docx)



# PENGHARGAAN TPID

Penetapan penerima penghargaan TPID berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Pokja Daerah TPIP. Kategori penghargaan yang diberikan kepada TPID bersifat dinamis. Penghargaan TPID ini diberikan oleh Presiden pada saat Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional

## Kategori penghargaan TPID Rakonas 2017

TPID **PROVINSI** TERBAIK

SUMATERA  
JAWA  
KTI

TPID **KAB/KOTA** TERBAIK

SUMATERA  
JAWA  
KTI

TPID **KAB/KOTA**  
BERPRESTASI

SUMATERA  
JAWA  
KTI

TPID **PROVINSI, KAB/KOTA**  
INOVATIF

SUMATERA  
JAWA  
KTI

TPID **PENDATANG BARU**

SUMATERA  
JAWA  
KTI



**KEPMENDAGRI PEMBENTUKAN TPID**



# KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

## TPID PROVINSI

<b>Ketua</b>	<b>Gubernur</b> , dan bertindak sebagai pelaksana harian tugas TPID Provinsi oleh <b>Sekretaris Daerah Provinsi</b>
Wakil Ketua	Kepala Perwakilan BI
Sekretaris	Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Anggota	Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu

## TPID KABUPATEN/KOTA

<b>Ketua</b>	<b>Bupati / Walikota</b> dan bertindak sebagai pelaksana harian tugas TPID Provinsi oleh <b>Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota</b>
Wakil Ketua	Pejabat Kantor Perwakilan BI
Sekretaris	Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Perekonomian
Anggota	Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu

Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu

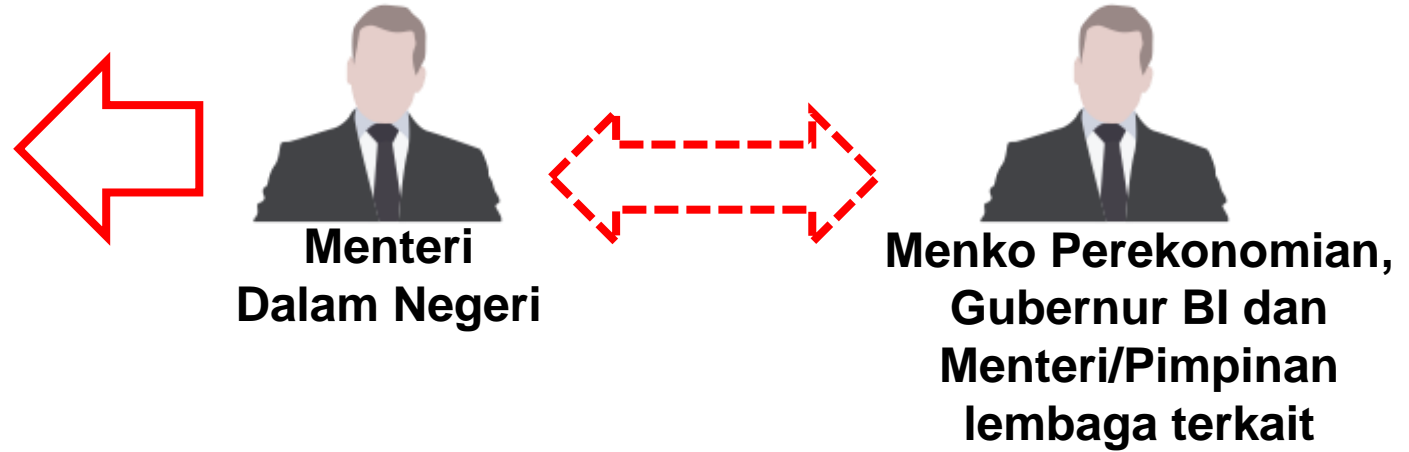
Bupati/Walikota dalam menunjuk wakil ketua, melakukan koordinasi secara tertulis kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia di wilayahnya masing-masing.



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

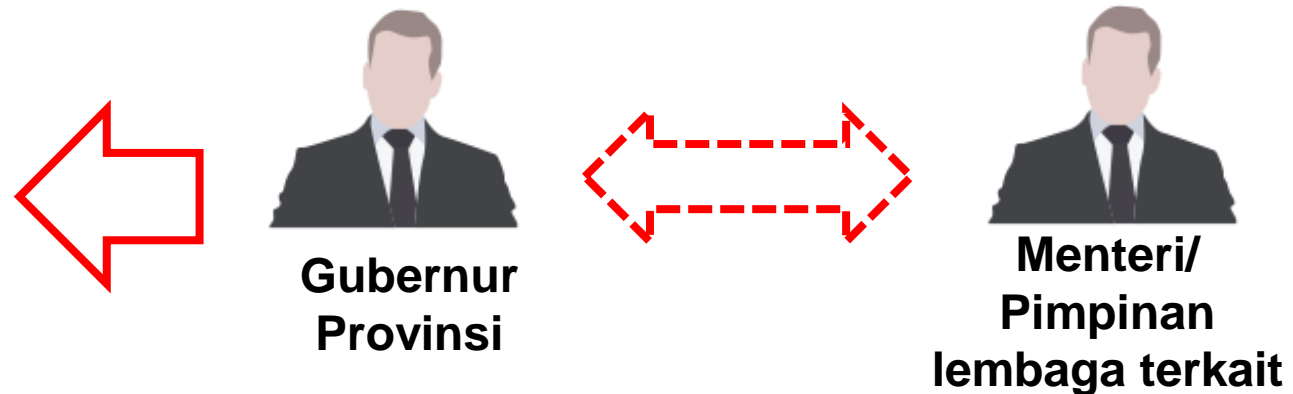
## TPID Provinsi

Pembinaan & Pengawasan penyelenggaraan tugas TPID Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan menteri/pimpinan lembaga terkait



## TPID Kab/Kota

Pembinaan & Pengawasan penyelenggaraan tugas TPID Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait



Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi daerah, regional dan nasional, fasilitasi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi



**TPID PROVINSI**

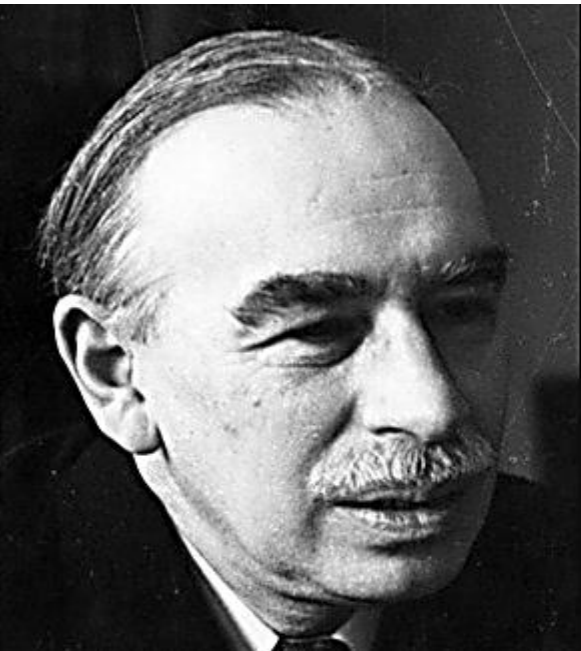
**APBD PROVINSI**

**Sumber lain yang sah**

**TPID KABUPATEN/KOTA**

**APBD KABUPATEN/ KOTA**

**Sumber lain yang sah**



By a continuing process of inflation,  
government can confiscate, secretly  
and unobserved, an important part  
of the wealth of their citizens.

— *John Maynard Keynes* —

# TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
COPYRIGHT © 2017

***Pernyataan disclaimer***

*informasi pada presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel pada saat disampaikan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data dan informasi tersebut dan kerugian yang ditimbulkan*